



P-ISSN : 2622-1276
E-ISSN: 2622-1284

The 6th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

TINGKAT KESEJAHTERAAN DITINJAU DARI KONSUMSI KALORI DAN PROTEIN, GINI RATIO, PERSENTASE KEMISKINAN, TINGKAT KEDALAMAN DAN TINGKAT KEPARAHAN KEMISKINAN DI DIY

Suwarta

Program Studi S1 Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Widyagama Malang

INFORMASI ARTIKEL

Data Artikel :

Naskah masuk, 3 Desember 2023
Direvisi, 6 Desember 2023
Diterima, 8 Desember 2023

Email Korespondensi :

suwarta@widyagama.ac.id

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah secara ekonomi ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Berhubungan dengan penggunaannya atau pola konsumsi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pola konsumsi kalori dan protein dan yang berhubungan dengannya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pola konsumsi bahan pangan dalam bentuk kalori dan protein hubungannya dengan tingkat kesejahteraannya. Metode penelitian menggunakan metode *survey* terhadap data sekunder yang berkaitan dengan pola konsumsi kalori dan protein. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa di Pedesaan DIY tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan DIY tingkat kesejahteraannya lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Pedesaan pada tahun 2011 – 2020, tingkat kesejahteraannya di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan pada tahun 2011 – 2020, tingkat kesejahteraannya di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Pada tahun 2021 di Pedesaan DIY, tingkat kesejahteraannya menduduki nomor lima tingkat Nasional. Persentase kemiskinan semakin rendah, Indeks keparahan kemiskinan semakin baik. Distribusi pendapatan di Indonesia lebih baik dibanding di DIY.

Kata Kunci: *Pendapatan, Kesejahteraan, Pola Konsumsi, Kemiskinan*

1. PENDAHULUAN

Hal yang paling penting dari tingkat kesejahteraan masyarakat adalah tingkat pendapatan, karena beberapa aspek dari tingkat kesejahteraan rumah tangga ditentukan oleh tingkat pendapatannya. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, dibatasi oleh tingkat pendapatannya, terutama bagi masyarakat yang berpendapatan rendah. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumah tangga, maka persentase pendapatan untuk mengkonsumsi bahan pangan semakin berkurang, walaupun tingkat

konsumsinya meningkat. Semakin tinggi besarnya pendapatan rumah tangga maka persentase pendapatan untuk mengkonsumsi bahan pangan akan semakin berkurang. Dengan kata lain, apabila terjadi peningkatan pendapatan dan peningkatan pendapatan tersebut tidak merubah pola konsumsi maka rumah tangga tersebut adalah sejahtera. Sebaliknya, apabila peningkatan pendapatan rumah tangga tersebut dapat merubah pola konsumsi rumah tangga maka rumah tangga tersebut tidak sejahtera atau belum sejahtera. Tingkat konsumsi bahan makanan yang semakin meningkat akan mengakibatkan semakin meningkatnya kualitas bahan pangannya, sehingga tingkat konsumsi bahan makanan dalam jumlah kalori dan protein semakin meningkat.

Kesejahteraan ekonomi merupakan tujuan hidup bagi seluruh keluarga yang ada di dunia. Kesejahteraan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan suatu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhannya baik itu makanan maupun non makanan untuk bisa bertahan hidup dan menjalankan aktivitas dengan baik [1]. Berdasarkan data BPS, bahwa pada tahun 2019 masih terdapat sekitar 25,14 juta orang atau 9,41 persen penduduk yang tergolong kedalam kemiskinan atau mereka yang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya dengan baik [2].

Pada dasarnya tingkat kesejahteraan masyarakat secara ekonomi ditentukan oleh tingkat pendapatannya, dan banyak pendapat yang mendukungnya. Menurut [3], peningkatan pendapatan rumah tangga, cenderung merubah pola konsumsi untuk pangan dan non pangan. Sesuai pendapat Engel, ketika pendapatan meningkat maka proporsi untuk pengeluaran pangan akan menurun, walaupun secara absolut jumlahnya meningkat. [4], mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi rumah tangga. [5], pola konsumsi dipengaruhi oleh beberapa variabel karakteristik responden yaitu pendapatan, pekerjaan, umur, pendidikan dan jumlah anggota keluarga. [6], mengatakan bahwa komoditas pangan di Jawa Timur bersifat inelastis terhadap harga dan lebih responsif terhadap perubahan pendapatan. Konsumsi rumah tangga atau penduduk menjadi salah satu variabel sosial ekonomi yang sangat penting. Indikator turunannya adalah konsumsi perkapita penduduk beserta polanya, konsumsi kalori, dan protein. Pola konsumsi untuk Makanan dalam bentuk Kalori dan Protein.

Selain pola konsumsi, tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan tingkat kecukupan gizinya, yaitu yang mencakup konsumsi kalori dan protein. Tingkat konsumsi kalori dan protein, merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal [2].

Tingkat kecukupan gizi merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk atau masyarakat di suatu wilayah. Kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah 2.100 Kkal dan 57 gram protein. Standar angka tersebut merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2008. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari untuk kalori dan protein sudah masyarakat Indonesia telah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein harian. Rata-rata konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 adalah 2.112,06 kkal, sementara untuk konsumsi protein 61,98 gram, dan pada tahun 2021 adalah 2.143,21 kkal dan 62,28 gram. Dengan dasar permasalahan tersebut, maka

penulis ingin mengetahui sejauhmana keadaan di DIY tentang tingkat konsumsi makanan dalam jumlah kalori dan proteinnya, dan bagaimana keadaan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Masalah-masalah tersebut antara lain tentang keadaan kemiskinan, persentase penduduk miskin, indek keparahan kemiskinan, gini *ratio* dan lainnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pola konsumsi penduduk DIY secara keseluruhan, dan dibedakan antara pedesaan dengan perkotaan. Terdiri dari pola konsumsi bahan makanan dalam bentuk kalori dan protein.

Ruang lingkup atau objek dalam penelitian ini adalah tentang pola konsumsi Makanan di DIY. Dalam bentuk Pola konsumsi kalori dan protein yang dimaksud terdiri dari pola konsumsi :

- a. Pola konsumsi makanan, kalori
- b. Pola konsumsi makanan, protein.
- c. Kemiskinan.
- d. Persentase Penduduk Miskin
- e. Indek keparahan kemiskinan
- f. Ketimpangan pendapatan

Alat analisis menggunakan system tabel silang. Tempat penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data dengan cara tabulasi, yaitu mengambil data yang telah tersedia di BPS.

Definisi operasional variabel penelitian :

- a. Pola konsumsi bahan makanan, kalori adalah jumlah konsumsi dalam bentuk kalori yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam waktu per kapita per hari, Kkalori per kapita per hari.
- b. Pola konsumsi bahan makanan, dalam bentuk protein yang dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan makanan dalam waktu per kapita per hari, Kkalori per kapita per hari.
- c. Teknik analisis data dengan menggunakan tabel silang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola konsumsi untuk Makanan dalam bentuk Kalori dan Protein

Tingkat kecukupan gizi yang mencakup konsumsi kalori dan protein merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Jumlah konsumsi kalori dan protein dihitung berdasarkan jumlah dari hasil kali antara kuantitas setiap makanan yang dikonsumsi dengan besarnya kandungan kalori dan protein dalam setiap makanan tersebut. Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, jenis aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal [2].

Tingkat kecukupan gizi adalah salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk atau masyarakat di suatu wilayah. Kecukupan gizi dapat dihitung dari besarnya kalori dan protein yang dikonsumsi oleh penduduk di suatu wilayah. Angka Kecukupan Gizi yang dianjurkan bagi masyarakat Indonesia adalah 2.100 Kkal dan 57 gram protein. Standar angka tersebut merupakan rekomendasi dari hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke-11 tahun 2008. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, bahwa rata-rata konsumsi per kapita per hari untuk kalori dan protein sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori dan protein harian. Rata-rata

konsumsi kalori per kapita per hari penduduk Indonesia pada Maret 2020 adalah 2.112,06 kkal, sementara untuk konsumsi protein 61,98 gram, dan pada tahun 2021 adalah 2.143,21 kkal dan 62,28 gram.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 konsumsi kalori sebanyak 2143,98 Kalori dan 65,25 gram protein. Di pulau Jawa lainnya, yaitu Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, konsumsi kalori masing-masing adalah 2 223,32 Kalori, 2 213,98 Kalori, 2 072,28 Kalori dan 2 143,98 Kalori. Sementara itu untuk konsumsi protein masing-masing adalah 70,51 gram, 64, 79 gram, 59, 28 gram dan 60,68 gram. Nampak bahwa di Jawa jumlah kalori yang dapat dikonsumsi telah memenuhi standar jumlah (lebih dari jumlah standar yang ditetapkan) kecuali di Jawa Tengah. Sementara itu jumlah konsumsi protein semuanya berada di atas angka standar yang telah ditetapkan. Propinsi paling tinggi konsumsi kalori adalah propinsi Nusa Tenggara Barat dengan jumlah konsumsi kalori 2 542, 98 Kkalori. Namun masih banyak propinsi dengan jumlah konsumsi kalori di bawah standar kecukupan, yaitu ada 14 propinsi, antara lain : Riau (2 079,53 Kalori), Lampung (2 097,21 Kalori), Jawa Tengah 2072,28 Kalori, Nusa Tenggara Timur (2 020,33 Kalori), Kalimantan Barat 1941,40 Kalori, Kalimantan Selatan 1981,64 Kalori, Kalimantan Timur 2023,44 Kalori, Sulawesi Utara 2008,55, Sulawesi Selatan 2046,29 Kalori, Sulawesi Tenggara 2009,24 Kalori, Gorontalo 2098,41 Kalori, Sulawesi Barat 1874,88 Kalori, Maluku Utara 1862,15 Kalori, Maluku Barat 1911,04 Kalori, dan Papua 1879,71 Kalori [7].

Dari Tabel 1 nampak bahwa selama 7 tahun jumlahnya konsumsi makanan dalam bentuk kalori Masyarakat DIY lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia. Sementara itu, jumlah konsumsi makanan dalam bentuk protein nampak bahwa masyarakat di DIY selama 9 tahun lebih tinggi jumlah konsumsi proteinnya dibanding dengan di Indonesia. Dengan data tersebut dapat dijadikan sebagai pendukung bahwa masyarakat di DIY lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat di Indonesia pada umumnya.

Tabel 1. Pola Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan DIY, Tahun 2011-2021

No.	Tahun	Daerah Istimewa Yogyakarta		Indonesia	
		Kalori (Kalori)	Protein (gram)	Kalori (Kalori)	Protein (gram)
1.	2011	1832,26	53,81	1952,01	53,81
2.	2012	1838,27	53,13	1852,64	53,14
3.	2013	1946,37	60,06	1842,75	60,06
4.	2014	1968,87	60,63	1859,30	53,91
5.	2015	1939,53	57,48	1992,69	55,11
6.	2016	2063,40	61,71	2037,40	56,67
7.	2017	2254,22	69,78	2152,64	62,20
8.	2018	2223,71	70,18	2147,09	62,19
9.	2019	2200,67	70,43	2120,52	62,13
10.	2020	2146,57	68,95	2112,06	61,98
11.	2021	2143,98	65,25	2143,21	62,28

Sumber : Publikasi Statistik Indonesia, 2021.

Pada tabel 1 nampak bahwa dalam kurun waktu tahun 2011-2021 di DIY jumlah konsumsi Kalori paling tinggi adalah pada tahun 2017 dengan tingkat 2254,22 Kalori dan konsumsi Protein pada tahun 2019 dengan tingkat konsumsi 70,43 gram. Sementara itu konsumsi protein, di Indonesia paling tinggi pada tahun 2017 sebesar 2152,64 Kalori dan konsumsi protein pada tahun 2017 sebesar 62,20 gram. Di Indonesia, di perkotaan konsumsi protein rata-rata sebanyak 64,01 gram dan di daerah perdesaan rata-rata sebanyak 60,00 gram dan di seluruh Indonesia (daerah perkotaan dan perdesaan) sebanyak 62,28 gram. Di DIY, konsumsi protein di daerah perkotaan 67,30 gram, di perdesaan 59,36 gram dan di seluruh DIY (perkotaan dan perdesaan) sebanyak 65,25 gram. Nampak

bahwa di DIY baik di daerah perkotaan dan perdesaan jumlah konsumsi protein lebih tinggi dibanding dengan tingkat nasional [7].

Di daerah tingkat 1 di seluruh Indonesia, di kawasan perkotaan dan perdesaan konsumsi protein paling tinggi adalah di Nusa Tenggara Barat, yaitu sebanyak 76,79 gram terdiri dari di perkotaan 79,33 gram dan di perdesaan 74,27 gram. Sementara itu, paling rendah adalah di propinsi Gorontalo, yaitu di perkotaan 57,62 gram, di perdesaan 57,09 gram dan di seluruh Gorontalo (perkotaan dan perdesaan) sebanyak 57,32 gram [7]. Di DIY, jumlah konsumsi kalori sebanyak 2.143,98 Kkalori/kapita dan jumlah protein sebanyak 65,25 gram per kapita. Di DKI Jakarta jumlah kalori sebanyak 2.223,32 Kkalori per kapita dan protein 75,51 gram per kapita.

Seperti halnya pada masalah pola konsumsi, maka untuk konsumsi kalori dan protein antara kawasan perkotaan dan perdesaan jelas berbeda. Secara teori jumlah konsumsi kalori dan protein di perkotaan lebih banyak dibanding dengan di perdesaan, disebabkan karena di perkotaan tingkat pendapatan atau tingkat kesejahteraannya jauh lebih tinggi dibanding di perdesaan. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa belum tentu di perkotaan lebih sejahtera dibanding dengan di perdesaan. Menurut Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021 menunjukkan bahwa di propinsi Banten, Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Bali dan Sumatra Selatan jumlah konsumsi kalori per-kapita per di perkotaan hari lebih rendah dibanding dengan di perdesaan. Namun semuanya berada pada posisi di atas garis kemiskinan konsumsi kalori tingkat nasional.

Demikian juga menurut Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021 konsumsi kalori di DIY di Perkotaan pada urutan nomor 8 dengan tingkat konsumsi 2.154,82 Kkalori dan di Pedesaan pada urutan nomor 10 dengan tingkat konsumsi 2.112,93 kkalori. Untuk konsumsi kalori pada 10 besar penduduk Indonesia di Perkotaan secara berturut-turut adalah: 1. NTB (2.579,22 kkalori), 2. DKI (2.223,32 Kkalori), 3. Banten (2.221,47 Kkalori), 4. Kalimantan Selatan (2.215,78 Kkalori), 5. Jawa Barat (2.183,59 Kkalori), 6. Bali (2.165,75 Kkalori), 7. Kepulauan Riau (2.156,15 Kkalori), 9. Sulawesi Selatan (2.153,38 Kkalori), dan 10. Sumatra Selatan (2.150,27 Kkalori), dan untuk di Perkotaan Indonesia 2.133,69 Kkalori. Sedangkan di Perdesaan, secara berturut-turut adalah: 1. Nusa Tenggara Barat (2.507,10 Kkalori), 2. Kalimantan Selatan (2.371,16 Kkalori), 3. Banten (2.353,87 Kkalori), 4. Jawa Barat (2.322,48 Kkalori), 5. Sumatra Selatan (2.281,24 Kkalori), 6. Bali (2.271,26 Kkalori), 7. Kalimantan Tengah (2.237,96 Kkalori), 8. Bengkulu (2.180,86 Kkalori), 9. Sulawesi Selatan (2.137,52 kkalori), dan untuk Indonesia 2.155,73 Kkalori.

Menurut Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021 untuk konsumsi protein DIY di Perkotaan menempati urutan nomor 6 dengan konsumsi protein sebanyak 67,30 gram/kapita, dan di Pedesaan tidak termasuk dalam 10 besar. Konsumsi proteim pada 10 besar penduduk Indonesia di Perkotaan secara berturut-turut adalah: 1. NTB (79,33 gram), 2. Kepulauan Riau (71,23 gram), 3. DKI (70,51 gram), 4. Kalimantan Selatan (69,49gram), 5. Banten (67,43), 6. DIY (67,30), 7. Kep. Bangka Belitung (65,55 gram), 8. Kalimantan Tengah (65,26 gram), 9. Aceh (65,21 gram), 10. Jawa Barat (64,42 gram), dan untuk Indonesia 64,01 gram. Sedangkan di Perdesaan, secara berturut-turut adalah : 1. Nusa Tenggara Barat (74,27 gram), 2. Kalimantan Selatan (69,21 gram), 3. Jawa Barat 66,14 gram), 4. Banten (64,83 gram), 5. Kep. Bangka Belitung (63,45 gram), 6. Sumatra Selatan (63,38 gram), 7. Kalimantan Tengah (63,03 gram), 8. Bali (62,71 gram), 9. Aceh (61,92 gram), 10. Sumatra Utara (61,87 gram), dan untuk Indonesia 60,00 gram [8].

3.2 Kemiskinan

Kemiskinan menjadi tolok ukur utama terhadap penentuan tingkat kesejahteraan rakyat dalam suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin memburuk. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Penanggulangan masalah kemiskinan dan kelaparan menjadi fokus pertama dari Tujuan Pembangunan Milenium (TPM) yang dilanjutkan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) [2].

Salah satu permasalahan klasik bagi negara-negara berkembang adalah kemiskinan. Kemiskinan menjadi salah satu permasalahan yang menghambat banyak kemajuan dari negara-negara berkembang yang memiliki potensi besar. Indonesia sebagai salah satu negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang juga memiliki persoalan yang sama. Menurut Badan Pusat Statistik 2020, kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran [9].

Dari tabel 2 nampak bahwa jumlah penduduk miskin di DIY paling sedikit adalah tahun 2019 dengan jumlah 448,47 (000) orang, kabupaten Kulon Progo sebanyak 74,62 (000), kabupaten Bantul sebanyak 131,15 (000) dan Kodya sebanyak 29.45 (000) orang. Sementara itu di Sleman 34,07 (000) orang dan di Kulon Progo sebanyak 74,62 (000) orang. Distribusi penduduk miskin menurut wilayah kabupaten/kota di DIY menunjukkan pola yang tidak merata. Ketidakmerataan ini ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin maupun persentasenya yang sangat bervariasi antarwilayah kabupaten/kota [2].

Berdasarkan jumlah jiwa, sebaran penduduk miskin tahun 2018-2019 sebagian besar terdapat di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul. Jumlah penduduk miskin di kedua kabupaten tercatat sebesar 131,15 ribu dan 123,08 ribu jiwa pada kondisi tahun 2019. Sementara, populasi penduduk miskin yang terendah terdapat di Kota Yogyakarta sebanyak 29,45 ribu jiwa dan diikuti oleh Kulon Progo. Ukuran jumlah penduduk miskin ini belum mempertimbangkan aspek jumlah penduduk dan luas wilayah yang sangat bervariasi. Berdasarkan ukuran persentase (P0), maka Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul menjadi dua daerah yang memiliki level kemiskinan tertinggi di DIY. Persentase penduduk miskin di kedua kabupaten pada kondisi 2019 tercatat sebesar 17,39 persen dan 16,61 persen. Sementara, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,84 persen dan 7,41 persen menjadi dua daerah dengan persentase penduduk miskin terendah di DIY [2].

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin di DIY Per Kabupaten Tahun 2010 – 2022 (000)

Tahun	Kodya Yogyakarta	Sleman	Gunung Kidul	Bantul	Kulon Progo	DIY
2010	37.80	117.00	148.70	146.90	90.10	540.50
2011	37.70	117.30	157.10	159.40	92.80	564.30
2012	37.40	118.20	157.80	159.20	93.20	565.70
2013	35.60	110.80	152.40	156.60	86.50	541.90
2014	35.60	110.40	148.40	153.50	84.70	532.60
2015	35.98	110.96	155.00	160.15	88.13	550.23
2016	32.06	96.63	139.15	142.76	84.34	494.94
2017	32.20	96.75	135.74	139.67	84.17	488.53
2018	29.75	92.04	125.76	134.84	77.72	460.10
2019	29.45	90.17	123.08	131.15	74.62	448.47
2020	31.62	34.07	29.68	138.66	78.06	475.72
2021	34.07	108.93	135.33	146.98	81.14	506.45
2022	29.68	98.92	122.82	130.13	73.21	454.76

Sumber : Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021.

Secara umum, perbedaan level kemiskinan antar wilayah merepresentasikan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah yang cukup heterogen. Perbedaan kondisi geografis, struktur ekonomi dan kesempatan kerja, dan kualitas infrastruktur publik terutama pendidikan, kesehatan, serta pasar adalah menjadi beberapa penyebab utama. Penyebab yang lain adalah perbedaan tingkat kemudahan dalam mengakses sarana yang tersedia. Perkembangan kemiskinan di kabupaten dan atau kota selama lima tahun terakhir secara umum menunjukkan pola yang menurun. Penurunan terbesar dari sisi jumlah terjadi di Gunungkidul. Sementara, penurunan terbesar dari sisi persentase terjadi di Kulon Progo. Penurunan kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon Progo berlangsung lebih cepat dan program pengentasan kemiskinan mampu berjalan lebih efektif dibandingkan dengan di Kota Yogyakarta dan Sleman. Hal ini disebabkan karena kemiskinan di Kota Yogyakarta dan Sleman levelnya sudah rendah, yaitu di bawah 8 persen, yang tersisa adalah hanya kerak kemiskinan atau penduduk miskin yang persisten. Sementara, kemiskinan di Gunungkidul dan Kulon progo secara level masih tinggi sehingga lebih mudah untuk diintervensi [2].

3.3 Persentase Penduduk Miskin

Metode pengukuran kemiskinan yang digunakan di banyak negara termasuk Indonesia masih bertumpu pada pendekatan moneter atau ekonomi. Kemiskinan dihitung menggunakan pendekatan pendapatan atau pengeluaran rumah tangga atau penduduk. Konsep kemiskinan di Indonesia diukur menggunakan pendekatan pengeluaran yang dikenal dengan kebutuhan dasar minimum (*basic needs approach*). Kebutuhan dasar minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang yang mencakup kebutuhan makanan yang disetarakan dengan 2.100 kalori perkapita sehari ditambah dengan kebutuhan non makanan yang mendasar (pakaian, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya). Ukuran ini disebut dengan garis kemiskinan. Seseorang dikatakan miskin, apabila memiliki pengeluaran sebulan lebih rendah dari garis kemiskinan [2].

Tabel 3. Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

No.	Tahun	Kodya	Sleman	Gunung Kidul	Bantul	Kulon progo	DIY
1	2011	9,62	10,61	23,03	17,28	23,62	16,14
2	2012	9,38	10,44	22,72	16,97	23,32	15,88
3	2013	8,82	9,68	21,70	16,48	21,39	15,03
4	2014	8,67	9,50	20,83	15,89	20,64	14,55
5	2015	8,75	9,46	21,73	16,33	21,40	14,91
6	2016	7,70	8,21	19,34	14,55	20,30	13,34
7	2017	7,64	8,13	18,65	14,07	20,03	13,02
8	2018	6,98	7,65	17,12	13,43	18,30	12,13
9	2019	6,84	7,41	16,61	12,92	17,39	11,70
10	2020	7,27	8,12	17,07	13,50	18,01	12,28
11	2021	7,64	8,64	17,69	14,04	18,38	12,80
12	2022	6,62	7,74	15,86	12,27	16,39	11,34

Source Url: <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/274/1>

Pada umumnya, di daerah tingkat II di DIY persentase penduduk miskin yang paling tinggi ada pada tahun 2011. Dalam perjalanannya, yaitu ke tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan walaupun tidak secara terus-menerus, namun ada ketidak konsistenan terus-menerus. Misalnya, pada tahun 2015 di semua daerah tingkat II jumlah persentase kemiskinan mengalami kenaikan, kemudian mengalami penurunan kembali. Untuk semua daerah tingkat II, dari tahun 2015 mengalami penurunan terus-menerus hingga sampai tahun 2019, kemudian menaik lagi tahun 2020-2021 kemudian turun lagi pada tahun 2022, tahun dengan persentase kemiskinan paling rendah.

Nilai nominal garis kemiskinan pada kondisi Maret 2002 tercatat sebesar Rp113,- ribu per kapita per bulan. Nilai nominal ini terus meningkat hingga Rp 463,5 ribu pada kondisi bulan Maret 2020.

Artinya, secara nominal garis kemiskinan meningkat. Jumlah penduduk miskin perkotaan pada September 2021 sebanyak 331,71 ribu orang dan turun sebanyak 27,0 ribu orang dibandingkan Maret 2021. Sementara itu, jumlah penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebanyak 142,78 ribu orang atau mengalami penurunan 5 ribu orang dibandingkan Maret 2021 [7].

Jumlah penduduk miskin pada periode September 2021 sebanyak 474,49 ribu orang dan turun 32,0 ribu orang terhadap periode Maret 2021. Apabila dibandingkan dengan periode September 2020, jumlah penduduk miskin September 2021 turun 28,65 ribu orang. Persentase penduduk miskin pada bulan September 2021 sebesar 11,91 persen dan turun 0,89 persen poin dibandingkan dengan bulan Maret 2021. Persentase penduduk miskin di perkotaan pada bulan September 2021 sebesar 11,20 persen dan turun 1,03 persen poin dibandingkan Maret 2021. Penduduk miskin perdesaan pada September 2021 sebesar 13,99 persen dan turun 0,45 persen poin dibandingkan Maret 2021 [7].

3.4 Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan (P_2).

Masalah kemiskinan disamping mencakup masalah jumlah dan persentase penduduk miskin, juga menyangkut masalah dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, pengertian indeks kedalaman kemiskinan (P_1) adalah menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P_2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Tabel 4. Indek Keparahhan Kemiskinan di Daerah Tingkat II di DIY

No.	Tahun	Kodya	Sleman	Gunung Kidul	Bantul	Kulon progo	DIY
1	2011	0,24	0,45	0,98	0,82	0,91	0,59
2	2012	0,37	0,73	0,89	0,81	1,00	0,75
3	2013	0,27	0,30	0,86	0,69	0,51	0,46
4	2014	0,26	0,22	1,03	0,59	0,69	0,61
5	2015	0,23	0,37	1,33	0,89	1,24	0,83
6	2016	0,19	0,34	1,30	0,41	1,00	0,59
7	2017	0,48	0,28	0,79	0,56	0,64	0,55
8	2018	0,34	0,20	1,16	0,46	0,56	0,50
9	2019	6,84	7,41	16,61	12,92	17,39	11,70
10	2020	0,28	0,33	0,63	0,43	0,86	0,46
11	2021	0,21	0,32	0,76	0,54	0,75	0,65
12	2022	0,13	0,27	0,67	0,50	0,56	0,51

Source Url: <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/274/1>

Masalah kemiskinan disamping mencakup masalah jumlah dan persentase penduduk miskin, juga menyangkut masalah dimensi kedalaman (*poverty gap index*) dan keparahan (*poverty severity index*) dari kemiskinan. Secara sederhana, pengertian indeks kedalaman kemiskinan (P_1) adalah menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan (P_2) menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks kedalaman dan keparahan menunjukkan persoalan kemiskinan yang semakin kronis.

Berdasarkan data *series* selama dua dekade terakhir, yaitu antara tahun 2010 – 2020 terdapat kecenderungan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik secara rata-rata maupun di wilayah perkotaan dan perdesaan di DIY. Penurunan tersebut menunjukkan suatu indikasi yang mengembirakan bagi pengentasan kemiskinan, meskipun dari sisi polanya terlihat cukup

berfluktuasi. Penurunan indeks kedalaman berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara itu, penurunan indeks keparahan menunjukkan tingkat ketimpangan di antara penduduk miskin semakin berkurang [2].

Nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan DIY pada kondisi Maret 2020 masing-masing sebesar 1,94 dan 0,46. Nilai kedua indeks lebih meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi Maret dan September 2019. Penyebab utamanya adalah dampak pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap penurunan konsumsi terutama pada kelompok penduduk miskin. Kenaikan nilai indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan juga terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Kenaikan kedua indeks ini menggambarkan kondisi pengeluaran penduduk miskin yang semakin menjauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran yang semakin melebar antar penduduk miskin [2].

Indeks Keparahannya Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

3.5 Ketimpangan.

Kebijakan untuk mengejar percepatan pertumbuhan ekonomi, berdampak pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara rata-rata. Namun demikian, di sisi lain juga mempunyai dampak negatif, yaitu sering membawa persoalan yaitu peningkatan ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Hal tersebut terjadi karena distribusi aset dan *skill* yang tidak tersebar secara merata antar penduduk. Sebagai akibatnya, adalah pendapatan yang diperoleh juga sangat bervariasi sesuai dengan kepemilikan aset dan keterampilan yang dimiliki. Indikator yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar penduduk (distribusi ukuran) adalah ukuran Bank Dunia, Gini Rasio, indeks Theil, Ukuran Desil, dan lainnya [2].

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan karena pada hakekatnya merupakan ukuran kemiskinan relatif, yaitu menghitung kemiskinan sebagai bagian dari distribusi pendapatan daerah. Perkembangan ekonomi yang baik dapat dilihat dari tingkat produk domestik regional bruto per kapita (PDRBPKP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Penanaman Modal Asing (PMA) di berbagai daerah di Indonesia., perubahan masing-masing variabel tersebut dipengaruhi oleh ketimpangan pendapatan di berbagai daerah, khususnya di Indonesia. T [10].

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat indeks ketimpangan pendapatan yang salah satunya adalah Gini rasio. Dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik yang terjadi antar masyarakat dapat dilihat menggunakan indeks gini (gini rasio). Mengukur ketimpangan dengan menggunakan indeks gini berbeda dengan indeks theil. Kisaran angka dalam indeks gini yaitu antara 0 sampai 1. Apabila angka indeks gini mendekati angka 0 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin rendah (merata) namun ketika mendekati 1 menandakan bahwa ketimpangan pendapatan yang terjadi antar masyarakat semakin tinggi (melebar).

Tabel 5. Perkembangan Gini *Ratio* DIY Tahun 2010 – 2022

No.	Tahun	Daerah IY	Indonesia
1.	2011	0,423	0,388
2.	2012	0,449	0,413
3.	2013	0,416	0,406
4.	2014	0,435	0,414
5.	2015	0,420	0,402
6.	2016	0,425	0,394
7.	2017	0,440	0,391
8.	2018	0,422	0,384
9.	2019	0,428	0,380
10.	2020	0,437	0,385
11.	2021	0,436	0,381
12.	2022	0,459	0,381

Source Url: <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/333/2/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota.html>

4 KESIMPULAN

Di Pedesaan, DIY tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan, DIY tingkat kesejahteraan lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Pedesaan pada tahun 2011 – 2020, tingkat kesejahteraan di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Di Perkotaan pada tahun 2011 – 2020, tingkat kesejahteraan di DIY lebih tinggi dibanding dengan tingkat Nasional. Pada tahun 2021 di Pedesaan DIY, tingkat kesejahteraannya menduduki nomor lima Nasional. Pada tahun 2021 di Perkotaan DIY, tingkat kesejahteraannya menduduki nomor dua Nasional. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan, di daerah tingkat II paling rendah berada pada tahun terakhir. Tingkat keparahan kemiskinan di kodya Yogyakarta adalah paling baik dibanding di daerah tingkat II yang lain. Tingkat pemerataan pendapatan belum mencapai kondisi yang terbaik, pada umumnya berada pada posisi yang masih kurang baik, dengan nilai gini *ratio* lebih besar dari 0,3 (gini *ratio* yang terbaik).

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada LPPM Universitas Widyagama Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyampaikan tulisan di Jurnal **CIASTECH 2023**, Alhamdulillah dapat membantu termuatnya makalah kami. Semoga dapat mendatangkan banyak manfaat kepada semua pihak, Aaamin.

6. REFERENSI

- [1] R. Nurhidayat and D. Maulina, "Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Petani Karet Rakyat di Kecamatan Bati," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*, vol. 6, no. 1, pp. 463–476, 2023.
- [2] BPS DIY, "Indikator Kesejahteraan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta,," 2020.
- [3] I. B. E. ARTIKA and I. A. K. MARINI, "IMPLIKASI EKONOMI DARI POLA KONSUMSI PANGAN DAN NON PANGAN MASYARAKAT KOTA MATARAM TAHUN 2018 - 2022,," *Jurnal Ganec Swara*, vol. 17, no. 2, 2023.
- [4] L. Anggalisa and Marwan, "Analisis Konsumsi Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Pendidikan Tambusai,," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 7, no. 2, 2023.
- [5] A. Dzaky Arrosyid and P. Pardian, "ANALISIS PERUBAHAN POLA KONSUMSI RUMAH TANGGA PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI KEL.BARU, KOTA JAKARTA TIMUR, DKI

- JAKARTA ANALYSIS OF CHANGES IN HOUSEHOLD CONSUMPTION PATTERNS DURING COVID-19 IN BARU SUB-DISTRICT, EAST JAKARTA CITY, DKI JAKARTA,” 2022.
- [6] D. Mayasari, D. Satria, and I. Noor, “Analisis Pola Konsumsi Pangan Berdasarkan Status IPM di Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, vol. 18, no. 2, pp. 191–213, Jan. 2018, doi: 10.21002/jepi.2018.11.
- [7] BPS, “Konsumsi Kalori dan Protein Penduduk Indonesia dan Provinsi,” Mar. 2022.
- [8] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, “Buletin Konsumsi Pangan Tahun 2021,” 2021.
- [9] S. Handayani and H. Yulistiyono, “PENGARUH PENDAPATAN, JUMLAH ANGGOTA KELUARGA DAN PENDIDIKAN TERHADAP KONSUMSI RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN BANYUWANGI,” 2023.
- [10] M. Janah, “ANALISIS PENGARUH TINGKAT PDRB PERKAPITA, INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA, DAN PENANAMAN MODAL ASING TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI INDONESIA PERIODE TAHUN 2019-2021,” *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, vol. 1, no. 4, pp. 23–43, Nov. 2022, doi: 10.58192/profit.v1i4.183.